

BAB II

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Implementasi Kebijakan Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung merupakan sebuah jawaban dari permasalahan lingkungan yang ada di tiap wilayah tingkat desa/kecamatan khususnya di Kabupaten Bandung. Program **Desa Sabilulungan Bersih** tersebut digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana sebelumnya sudah ada konsep kampung berkelanjutan untuk desa yang belum diintervensi oleh program *Eccovillage*. Program *eccovillage* dicirikan dengan penduduknya yang menerapkan kaidah lingkungan, dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sehingga potensi-potensi wisata yang ada di tiap desa ini jika sudah melaksanakan program kampung sabilulungan bersih tersebut akan dipromosikan sebagai desa yang berbasis ekowisata, atau wisata halal.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai penguat dalam laporan skripsi ini, penulis mencari referensi-referensi dari laporan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis dan substansi yang sama sebagai perbandingan terhadap penelitian yang lain dengan konteks, tema, dan topik yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kebijakan program kampung saber (sabilulungan bersih) yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, penelitian terdahulu yang dibandingkan pun berkenaan dengan masalah lingkungan, yang mana penelitiannya sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Program Kampung Saber

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis

1	S. Nadiyah 2019	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Sabilulungan Bersih (SABER) Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan (Studi Deskriptif di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)	(Amos Neolaka, 2008: 32).	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi
2	Dewimas Fatimah 2020	Analisis Implementasi Program Kampung Sabilulungan Bersih Kabupaten Bandung Wilayah Selatan Dengan Menggunakan Konsep Ecovillage (Studi Pada Kecamatan Rancabali)	Sugiyono (2018:216)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi
3	Suci ananda putri aiwa, Sisca Eka Fitria 2020	Identifikasi hambatan ecopreneur dalam penerapan program sabilulungan bersih di desa kutawaringin	Walla et., a.l (2016)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi

4	Dwita, Rama Nasdian, Fredian Tonny 2019	Analisis Hubungan Tingkat Partisipasi dan Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan	Ife dan Tesoriero (2008).	Kuantitatif	Kombinasi	Survey, angket, dan kuesioner
5	Siti Fatimatul Wafiroh 2018	Pengembangan Masyarakat Melalui Program Ecovillage dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Zubaedi,2013:8	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi

Sumber : Penulis 2021

1. Jurnal penelitian S. Nadiyah (2019) yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Sabilulungan Bersih (SABER) Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan (Studi Deskriptif di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)”**. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik analisis data yang dilakukan yaitu Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan teori (Amos Neolaka, 2008: 32). tersebut menjelaskan bahwa proses dalam mengkondisikan pemberdayaan program

Kampung Sabilulungan Bersih Kabupaten Bandung khususnya di Desa Nagrog direalisasikan secara partisipatif dengan mengajak warga desanya agar bersama-sama untuk memahami, dan mengenal potensi permasalahan lingkungan pada Desa Nagrog. Upaya pelaksanaan program Kampung Sabilulungan Bersih dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup, yaitu dengan melaksanakan kegiatan ahad bersih, pilah-pilih olah sampah (PPOP), bank sampah, pembuatan lubang cerdas organik (LCO), kawasan rumah pangan lestari dan penanaman pohon di kawasan satapok (Sabilulungan tanam pohon kesayangan). Lalu dengan adanya Program Kampung Sabilulungan Bersih di Kampung Cibiru mengalami peningkatan dalam menjaga kondisinya, masyarakat menjadi mandiri dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.

2. Jurnal Penelitian Dewimas Fatimah (2020) dengan judul **“Analisis Implementasi Program Kampung Sabilulungan Bersih Kabupaten Bandung Wilayah Selatan Dengan Menggunakan Konsep Ecovillage (Studi Pada Kecamatan Rancabali)”**. Penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik analisis data yang dilakukan meliputi Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori Sugiyono (2018) tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bandung memiliki potensi yang berbeda-beda pada setiap aspek yang dilihat dengan menggunakan konsep *ecovillage*. Pada pelaksanaan program Kampung Sabilulungan Bersih dan seluruh desa telah melaksanakan semua atribut dalam aspek *ecovillage*. Informasi tersebut sangat penting dalam menciptakan strategi yang tepat untuk setiap desa, karena setiap desa memiliki potensi, keadaan, atau pencapaian yang berbeda-beda. Kabupaten Bandung memiliki banyak masalah terhadap isu lingkungan hidup. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) melalui Dinas Lingkungan Implementasi program Kampung Sabilulungan Bersih pada

kecamatan Rancabali tersebut dilaksanakan dengan menyatukan konsep *ecovillage*, yaitu dengan melihat pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan spiritual untuk menerapkan program Kampung Sabilulungan Bersih.

3. Jurnal penelitian selanjutnya Suci ananda putri aiwa & Sisca Eka Fitria (2020) dengan judul **“Identifikasi hambatan ecopreneur dalam penerapan program sabilulungan bersih di desa kutawaringin”**. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, teknik analisis data yang dilakukan diantaranya observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil pada penelitian tersebut dengan menggunakan teori Walla et., a.l (2016) menunjukkan bahwa program kampung sabilulungan bersih yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah direalisasikan di Desa Kutawaringin, desa tersebut mengikuti dan mengimplementasikan program kampung saber, namun dari hasil identifikasi yang dilakukan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan yang dapat menjadi masalah dalam penerapan kampung saber tersebut.
4. Jurnal penelitian Dwita, Rama Nasdian dan Fredian Tonny (2019) yang berjudul **“Analisis Hubungan Tingkat Partisipasi dan Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan”**. Penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kombinasi, serta teknik analisis data yang dilakukan ialah dengan melakukan survey, angket, dan kuesioner. Penelitian kuantitatif tersebut dengan menggunakan teori Ife dan Tesoriero (2008) hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Tiap lapisan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan. Dengan demikian, program Kampung Saber dapat dikatakan berhasil dalam memberdayakan masyarakat terutama pada aspek lingkungan. Kampung Sabilulungan Bersih (Saber) yang dilakukan di Desa Nagrog secara langsung

membantu pembangunan desa dengan melalui pemberdayaan lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah dengan mengkombinasikan kehidupan sosial dan ekonomi yang merupakan salah satu bentuk pengembangan masyarakat berkelanjutan. Pemberdayaan tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dilihat siapa yang sebenarnya berpartisipasi dan terberdayakan berdasarkan lapisan sosial di masyarakat.

5. Dan jurnal penelitian selanjutnya Siti Fatimatul Wafiroh (2018) yang berjudul **“Pengembangan Masyarakat Melalui Program Ecovillage dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Studi Deskriptif di Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung”**. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif, lalu teknik analisis data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta teori yang digunakan ialah teori Zubaedi (2013:8). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertama, kondisi lingkungan hidup, sosial dan budaya di Desa Langensari mengalami perkembangan yang signifikan setelah diadakannya otonomi wilayah di Desa Cibodas. Kedua, program konsep *ecovillage* di Desa Langensari hadir dengan menggunakan pendekatan fleksibel. Yang mana dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan. Serta secara partisipatif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat. Ketiga, hasil dari program *ecovillage* yakni adanya pengelolaan sampah, konservasi lahan, resapan air, dan tempat pertemuan warga. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat melalui program *ecovillage* dalam pelestarian lingkungan hidup sudah tepat. Dengan adanya program *ecovillage* menjadikan masyarakat berswadaya dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Jika dilihat dari beberapa judul penelitian diatas, permasalahan dan keberhasilannya berkenaan dengan program kampung sabilulungan bersih dengan meliputi beberapa aspek dalam mendukung program tersebut, baik pemberdayaan masyarakat, konsep *ecovillage* yang dikolaborasikan dengan kampung saber, serta identifikasi hambatan program kampung saber yang diimplementasikan di desa. Terlepas dari perbedaan pendekatan, metode, dan teori yang dilakukan dalam penelitiannya terkait dengan program kampung sabilulungan bersih dapat membantu dan mampu menularkan program tersebut ke tiap desa-desa di Kabupaten Bandung.

2.2. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

2.2.1. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan sebuah proses dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama, untuk itu proses yang dilakukannya pun oleh dua orang atau lebih. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitinya adalah sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakan), dan administrasi yang berasal dari bahasa latin yaitu *ad* (insentif) dan *ministrare* yang diartikan sebagai melayani, membantu dan memenuhi. Di sisi lain, Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Secara umum administrasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah atau sudah ditentukan sebelumnya.

Apabila diimplementasikan secara formal dalam organisasi, maka dari proses kerjasamanya tersebut adalah mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam buku Drs. Ulbert Silalahi M.A. “Studi tentang Ilmu Administrasi” yang dikutip dalam Niara (2019:128) administrasi memiliki dua arti yakni arti secara sempit dan arti secara luas yaitu : “Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan kutipan teori diatas yang mengemukakan administrasi sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang dengan pembagian kerja dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien sama halnya seperti yang dilakukan pada Dinas LH yang melakukan kegiatan bersama dengan pembagian kerja yang terbagi pada tiap kompetensinya, seperti seksi PPKL pada dinas LH yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengendalian kerusakan lingkungan yang berarti sekaligus membuat dan melaksanakan kebijakan program kampung saber. Dinas LH dibantu oleh seksi PPKL dalam penyelenggaraan program kampung saber ini.

Selanjutnya pada teori Herbert A. Simon dalam Hindrajid, Widodo, & Nugroho, (2016:84) yang mengemukakan Pengertian Administrasi : “Administrasi sebagai aktivitas kelompok (orang) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan”. Kelompok atau orang yang melakukan aktivitas secara bekerja sama merupakan bentuk proses yang dilakuka dalam tahap pencapaian tujuan, sehingga dapat tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama kelompok pada program kampung saber ini dengan melibatkan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kebijakannya menjadi sebuah aktivitas yang dilakukan dengan banyaknya bantuan atau keterlibatan masyarakat (orang) maupun organisasi (kelompok) dalam menerapkan kebijakan program kampung saber (sabilulungan bersih) di Kabupaten Bandung, sebanyak 270 desa yang ada di Kabupaten Bandung menjadikan Dinas LH perlu melakukan kebijakan ini dengan banyak melibatkan pihak yang terkait agar dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya pengertian administrasi lanjutan teori diatas ini Menurut Moh. Rifai dalam Hindrajid et al., (2016:84) yang memaparkan pengertian menurutnya bahwa : “Administrasi merupakan suatu bantuan agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar dalam upaya untuk mencapai tujuan dengan tanpa menghambur-hamburkan sumber-sumber yang tersedia.” Dengan itu adanya kebijakan program kampung saber ini berdasarkan dari teori di atas

memperkuat formulasi kebijakan yang dibuat untuk kemudian direalisasikan dengan terimplementasi ke beberapa wilayah. Adanya bantuan agar usaha yang dihasilkan dapat berjalan dengan lancar tersebut merupakan bentuk proses kerjasama yang dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan dari dibuatnya kebijakan program ini, sehingga adanya keterlibatan pihak dan sumber daya yang dimanfaatkan dan diberdayakan dengan tanpa menghambur-hamburkan sumber-sumber yang tersedia, seperti contohnya adanya dana APBD yang dimanfaatkan oleh kebijakan program tersebut terhadap tiap wilayah/desa untuk merealisasikan program tersebut sebagai upaya dalam mensukseskannya program yang dibuat dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber yang tersedia.

Adapun lanjutan dari teori P. Siagian dalam buku yang sama Hindrajid et al., (2016:85) yang mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut : “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang manusia atau lebih merupakan bentuk rangkaian formulasi kebijakan yang disusun secara bersama atas dasar rasionalitas tertentu dalam suatu organisasi/dinas yang akan menyelenggarakan program kebijakan yang dibuat. Seperti kebijakan program saber ini merupakan dasar dari rasionalitas tertentu, karena terbuatnya kebijakan tersebut sebagai wujud dalam mengatasi permasalahan yang ada pada wilayah di Kabupaten Bandung dengan masalah-masalah tertentu, sehingga untuk mencapai suatu tujuannya pun sudah ditentukan sebelumnya untuk kemudian direalisasikan dan diimplementasikan secara merata dan menyeluruh.

Berkenaan dengan teori diatas yang selanjutnya pada teori Siagian dalam Pasolong (2017:3) dalam buku Teori Administrasi Publik yang mengemukakan Pengertian Administrasi sebagai berikut : ”Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia

atau lebih yang didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Beberapa pengertian administrasi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang terencana dilakukan oleh sekelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan rasional. Sehingga sasaran kebijakan yang direalisasikannya pun meliputi proses-proses yang dilakukannya agar terlaksanakannya kebijakan program kampung saber ini, proses-proses pelaksanaannya pun dilakukan dinas LH dalam merealisasikan kebijakan ini terhadap desa-desa yang didalamnya dibantu oleh perangkat setempat (kader), seperti RW, Karang Taruna tingkat desa/unit, PKK, dan pihak yang terkait lainnya di Kabupaten Bandung.

2.2.2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik atau yang sebelumnya Administrasi Negara merupakan sebuah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang mana proses tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, karena berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Jika dilihat, administrasi negara berorientasi kepada ilmu sosial yang mencakup tiga elemen penting kehidupan bernegara, dengan meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara tata ruang negara.

Jika secara luas, administrasi publik ialah kegiatan untuk melakukan proses rangkaian kebijakan publik untuk diimplementasikan pada publik. Seperti yang dipaparkan oleh Leonard D. White dalam buku Abdul Kadir (2020:45) : “Dalam arti luas administrasi publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atas kebijakan negara”. Kegiatan yang dilakukan bermaksud untuk melaksanakan dan memaksakan kebijakan yang sudah dibuat untuk diimplementasikan di negara terhadap masyarakat, yang

mana semua kegiatan yang berkenaan dengan melaksanakan dan memaksakan kebijakan negara yang sudah dibuat merupakan secara garis besar disebut administrasi publik.

Namun seiring berkembangnya zaman yang mana adanya pergeseran paradigma yang memunculkan adanya administrasi publik bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, dan mengatasi permasalahan sosial yang mendasari nilai-nilai berkembang dalam masyarakat. Menurut Frederickson dalam Tri Yuniningsih (2019:247), yang menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (*social equity*) ke dalam konsep administrasi bahwa administrasi tidak dapat netral. Maka dari itu administrasi publik mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Sehingga tergesernya paradigma dalam konteks administrasi negara menjadi administrasi publik. Berubahnya konsep administrasi negara menjadi administrasi publik ini diikuti dengan perkembangan paradigma dalam administrasi negara, yaitu telah bergeser dari paradigma pengembangan administrasi semata (*empowering the administration*) kepada paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam administrasi publik (*empowering the people to become partners in public administration*).

Secara sederhana, Administrasi Publik merupakan ilmu yang berkaitan dengan pemerintah atau publik dengan mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik yang didalamnya terdapat birokrasi penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik. Administrasi pembangunan pemerintahan daerah atau *good governance* yang saat ini bahkan perkembangannya mencakupi kepublikan (*publicness*) atau yang biasa dikenal dengan nilai publik (*public value*). Berkenaan dengan hal tersebut menurut pendapat dari Dwight Waldo dalam buku “Pengantar Studi *Public Administration*” (2017:52) yang mengemukakan bahwa : “Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/negara”. Organisasi dan manajemen yang dimana organisasi adalah pemerintah dan manajemen

manusia merupakan aparatur/pemangku kebijakan yang menggerakkan atau sebagai penggerak didalam organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (material/peralatannya) untuk pencapaian tujuan negara. Dalam melakukan proses pencapaian tujuannya, manajemen manusia menggunakan peralatannya dan material yang sudah ada baik sumber daya, anggaran, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya terhadap penyelenggaraan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sehingga hasil dari proses yang dilakukan oleh manajemen manusia dengan mengandalkan sumber daya sebagai alat untuk melakukan prosesnya pun menghasilkan tujuan yang tercapai, yang nantinya hasil pencapaian tujuannya merupakan bentuk pembangunan yang menguntungkan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut Nigro dan Nigro dalam buku Tri Yuniningsih, Dkk (2018:21) yang berpendapat bahwa : “Administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam organisasi negara meliputi cabang eksekutif, yudikatif, legislatif sehingga merupakan bagian dari proses politik yang berhubungan dengan sektor swasta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat”. Seperti yang dipaparkan pada pengertian administrasi publik diawal bahwa administrasi publik berorientasi pada ilmu sosial yang didalamnya mencakup tiga elemen penting, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini menjadi gambaran pada konsep kebijakan program kampung saber yang mana dengan diformulasikannya kebijakan program ini sebelumnya atas unsur kewenangan atau pelimpahan wewenang dari pusat (kementerian lingkungan hidup dan kehutanan) sebagai kelompok organisasi cabang eksekutif kepada Dinas Lingkungan Hidup di tiap wilayah untuk membuat kebijakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Dinas LH.

Adapun teori yang terkait dengan pengertian Administrasi Publik dalam buku Teori Administrasi Publik Menurut Chandler & Plano yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2017:8) ia berpendapat bahwa : “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, menimplementasikan, dan

mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Proses sumber daya dan personel merupakan penggerak dan dorongan untuk tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan organisasi dalam mengatasi permasalahan kebijakan publik, administrasi publik sebagai landasan untuk melakukan rangkaian kebijakan publik yang diformulasikan atas dasar permasalahan yang terjadi, adanya koordinasi dan organisir untuk memformulasikan kebijakan yang kemudian diimplementasikan secara terkelola atau *ter-manage* oleh *stakeholder* atau pihak yang terkait dalam kebijakan program yang dirumuskan dan kemudian keputusan-keputusan yang dibuat untuk memilih langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik.

Melihat dari konteks yang berkenaan dengan administrasi publik sebagai landasan dalam perumusan kebijakan yang didalamnya pun memuat unsur teori yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan sebagai salah satu upaya pelayanan publik. Karena Pelayanan publik menjadi orientasi kebijakan dan kegiatan negara dan masyarakat .

2.2.3. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan ilmu yang membahas tentang kaitannya terhadap perilaku sosial, teori, dan praktik dalam politik serta berkenaan dengan deskripsi dan analisis sistem politik dalam berperilaku politik. Ilmu politik ini berorientasi terhadap akademis, teori, dan riset yang dilakukan dalam ranah politik untuk kepentingan politik. Selain itu, ilmu politik juga mengkaji tentang kekuasaan dalam pembentukan ketetapan baik di sebuah organisasi dan kedudukan sistem pemerintahan yang termuat pada pemerintah atau organisasi internasional yang dilandasi dengan sikap politik serta prosedur publik di dalamnya yang dapat menilai keefektifan aktivitas pemerintahan dan publik dengan melaksanakan prosedur khusus, pemeriksaan dari komponen-komponen seperti keseimbangan, konsistensi, ketenteraman material dan perdamaian abadi. Aktivitas politik menjadi hal yang lumrah dilakukan dalam

rangka menciptakan demokrasi yang etis yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Seperti yang dikutip oleh Heywood Dalam buku Yudi Rusfiana & Ismail Nurdin (2017:15) yang menyebutkan bahwa : “Ilmu politik sebagai suatu keilmuan yang bersifat tinggi (*master science*)”. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di suatu negara, secara publik adanya entitas-entitas yang bersifat privat. Hal ini dimaksudkan agar publik menjadi sebuah tempatnya masyarakat yang mana segala urusannya diatur oleh regulasi yang dibuat publik untuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Adanya hal tersebut menjadikan suatu negara memiliki kondusivitas yang tinggi, disisi lain demi terjaganya kehidupan berbangsa dan bernegara yang segalanya diatur oleh ilmu politik sesuai dengan ranah-ranah publik dalam mengatur segalanya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan publik.

Menurut pendapat dari Sri Sumantri Dalam Amelia Haryanti & Yulita Pujilestari (2019:5) yang memaparkan ilmu politik sebagai berikut : “Ilmu Politik ialah badan dari asosiasi antar manusia yang diorganisasikan dalam berbagai macam lembaga politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik”. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu politik merupakan yang membahas tentang perilaku politik berdasarkan dengan teori dan praktik di dalam suatu organisasi atau badan dari asosiasi antar manusia sebagai bentuk untuk berinteraksi dalam menetapkan suatu hal atau tujuan secara bersama dan musyawarah demi tercapainya kepentingan politik, hal tersebut akan selalu dilakukan dalam berbagai macam lembaga politik baik terhadap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan negara untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat dan publik.

Ilmu dalam politik mempelajari sebuah segi khusus dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang

hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga dari tiap negara, dan hubungan antar sesama Negara yang pasti didalamnya adanya perebutan kekuasaan, harta maupun tahta. Hal ini tidak jarang memicu konflik antara negara, masyarakat di dalam negara, maupun pemerintahan. Karena manusia sebagai penggerak dalam melakukan tindakan tidak luput dari politik yang dilakukannya, sehingga dapat terjadinya konflik yang mungkin dapat berakibat fatal bagi negara maupun masyarakat. Jika melihat dari implikasi ilmu politik yang dilakukan, Berikut ini definisi politik menurut Andrew Heywood dalam buku Miriam Budiardjo (2017:16) yang berkaitan dengan masalah konflik ataupun konsensus : “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.

Berkenaan dengan hal tersebut, berikut pengertian ilmu politik menurut Rod Hague Et Al dalam buku Miriam Budiardjo (2017:16) yang mendefinisikan bahwa : “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”. Dari kutipan kedua teori diatas yang saling berkaitan jika disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi yang itu semua sebetulnya demi menegakkan kesejahteraan demokrasi di suatu negara yang dilakukan melalui birokrasi dalam pemerintahan maupun lembaga yang kedudukannya dalam publik sebagai yang mengatur atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada dalam publik. Karena, politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia, dan politik juga merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara untuk melakukan tindakan yang bersifat mengatasi masalah publik. Selain itu jika melihat secara konsensus bahwa ilmu yang didapatkan dalam

politik sebagai pedoman atau landasan utama manusia saat menerapkannya terkadang tidak sepenuhnya lancar, dengan demikian politik mampu dijadikan alasan atau senjata dalam menguntungkan kepentingan individu/kelompok. Sehingga orang-orang (pemangku kepentingan) yang merasa dirinya mampu untuk mengatasi persoalan dengan duduk dalam tahta pemerintahan, namun karena banyaknya orang-orang untuk menjadi pemangku kepentingan dengan duduk dalam tahta pemerintahan, maka banyaknya juga persaingan orang-orang untuk memperebutkan posisi kekuasaan yang tentu tidak lepas dari konflik yang terjadi hingga dapat berakibat fatal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan negara serta masyarakat.

Selanjutnya pengertian ilmu politik menurut Ramlan Surbakti yang dikutip dalam Miftahul Khair, Suud, Rispawati (2019:150) bahwa : “Ilmu politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat terhadap kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah”. Dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, tentu perlunya komunikasi dengan cara berinteraksi dari pemerintah terhadap masyarakat, sehingga terciptanya sinergitas dan keterbukaan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensejahterakan publik. Salah satunya melalui program kebijakan yang di formulasikan oleh pemerintah untuk kemudian diimplementasikan ke masyarakat di suatu wilayah yang sekiranya mendapati permasalahan-permasalahan yang terjadi. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang dilakukan pemerintah bersifat mengikat masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengatur segala yang ada di masyarakat demi terciptanya kemakmuran dan keadilan, itu pun dilakukannya pengikatan terhadap masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan agar sama-sama enak. Sehingga kebaikan dari hasil pelaksanaan keputusan yang dibuat dan diimplementasikan terhadap masyarakat pun menjadi lebih relevan.

2.2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan kebijakan publik secara menyeluruh. Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik ialah mengacu terhadap rangkaian tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan pengertian implementasi kebijakan publik.

Seperti pendapat menurut Mulyadi (2015:26) yang menyatakan bahwa : “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Pengertian tersebut bahwa suatu kebijakan mampu merubah atau mentransformasikan suatu hal di dalam publik dengan dilakukannya implementasi kebijakan oleh multiorganisasi (pemangku kebijakan) dengan menerapkan hasil keputusan dari kebijakan yang dibuat kemudian diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dibuat terhadap berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat.

Kemudian pendapat menurut Udoji dalam Mulyadi (2015:46), yang memaparkan implementasi kebijakan sebagai berikut : “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”. Pelaksanaan kebijakan disebut penting karena inilah yang diinginkan masyarakat, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan, disini yang dimaksud ialah jika pelaksanaan kebijakan tanpa dibuatnya dahulu kebijakan mungkin bisa terjadi, namun jika kebijakan sudah dibuat akan tetapi tidak dilaksanakan ini sama saja tidak ada pengaruhnya terhadap persoalan yang ada pada publik, kebijakan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan hanya akan menjadi sebuah arsip yang tidak penting, yang tidak ada sama sekali implikasinya terhadap pengaruh masyarakat.

Adapun pendapat Implementasi kebijakan berperspektif top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136) : Yang menamakan “Model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III tersebut, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masalah utama dari implementasi kebijakan terhadap administrasi publik ialah : *Lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation to decision of policymakers will not be carried out seccessfully*. Pada teori Edward ini cenderung menyarankan untuk lebih memperhatikan isu pokok permasalahan yang muncul, yang mana masalah tersebut jika akan dilakukan implementasi kebijakan harus terlebih dahulu memahami isu pokoknya agar implementasi kebijakan menjadi efektif saat dilaksanakan.

Selanjutnya Menurut Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) yang mendefinisikan bahwa : “Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Melihat dari kutipan teori tersebut bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala dan hambatan, yang utamanya berasal dari faktor lingkungan dengan konteks yang mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Gagasan Grindle ini ialah bahwa jika suatu kebijakan telah ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi yang akan dilakukan belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat bergantung pada *implementability* dari program yang direalisasikan tersebut.

Keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, Menurut Merilee S. Grindle dalam Alman Manongga, Sofia Pangemanan, Josef Kairupan (2018:5) yang

menyebutkan, yaitu : “Ada isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*implementasi context of implementation*)”. Bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara didalam konteks implementasinya memiliki unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi pemangku kebijakan yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Itu semua perlu dilakukan demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan agar menghasilkan dampak yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.5. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penerapan berupa tindakan atau pelaksanaan terhadap rumusan proses perencanaan kebijakan yang sudah dibuat, implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Bisa berupa kebijakan atau program yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat, baik berupa penyediaan sarana dan pra sarana atau bantuan lainnya yang dapat berdampak pada masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Gordon dalam Mulyadi, (2015:24) yang menyatakan bahwa : “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. Tindakan implementasi dapat dilakukan dari basis kebijakan atau program yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan merealisasikan program yang dibuat, tentu harus menimbulkan dampak atas program yang diimplementasikannya.

Menurut Grindle dalam Mulyadi (2015:47) yang menyatakan bahwa : “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Dalam perumusan kebijakan atau program tentu didalamnya terdapat kegiatan yang

bersifat administratif, tindakan dalam melakukan proses administratif ini pun perlu dilakukan terhadap program yang akan direalisasikan, dengan ditelitinya program yang dibuat menjadi sebuah parameter apakah program yang akan direalisasikan akan efektif atau tidaknya, tingkatan program yang dibuat tergantung dengan tingkat permasalahan yang ada. Sehingga dengan adanya proses administratif ini merupakan hal yang umum, dan juga sebagai salah satu bentuk implementasi yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan program yang dibuat. Karena sebuah kebijakan atau program yang akan direalisasikan perlu diteliti secara menyeluruh, mulai dari dampak yang akan dirasakan, tahap yang harus dilakukan hingga dalam penerapan program atau kebijakannya tersebut yang tentu didalamnya terdapat proses-proses yang harus dilalui.

Salah satunya dengan adanya sumber daya yang memadai pada saat melakukan implementasi. Karena implementasi menurut Jones dalam Sutojo (2015:3) : “Sebagai (*a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*). Dalam hal ini implementasi diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan terhadap realisasi program yang akan dilakukan, sumber daya tambahan yang didapatkan pun berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam suatu kebijakan atau program”.

Selain itu pendapat menurut Widodo dalam Sutojo (2015:4) berkenaan dengan pengertian diatas yang mengatakan bahwa : “Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. Pelaksanaan tindakan implementasi tentu perlu melibatkan sumber-sumber daya salah satunya sumber daya manusia sebagai penggerak dalam melakukan proses-proses yang berkaitan dengan implementasi dari kebijakan atau program. Tidak hanya itu saja, sumber lainnya pun seperti

dana atau kemampuan operasional merupakan bentuk penunjang dalam keberhasilan suatu kebijakan atau program yang akan diimplementasikan, adanya dana dan kemampuan operasional menjadi sebuah motivasi didalam sumber daya yang mencakup banyak aspek diantaranya sumber daya manusia yang sudah pasti memerlukan dana sebagai alat untuk membeli keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam program kebijakan yang sudah dirumuskan dan diformulasikan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta ataupun pihak yang terkait dengan program kebijakan yang akan dilakukan.

Selanjutnya Menurut Mulyadi (2015:12) bahwa : “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan yang dibuat tersebut menjadi pola-pola operasional terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, serta berusaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang sudah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dengan melihat dari dampak yang muncul terhadap program kebijakan yang sudah diimplementasikan, disini perlu adanya evaluasi sebagai tolak ukur dari hasil implementasi yang sudah dilakukan terhadap program kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Sehingga nantinya hasil dari implementasi tersebut mampu membuat perubahan berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan tujuannya.

Pada dasarnya Implementasi Menurut Syauckani dkk dalam Pratama (2015:229): “Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”. Tahap pada proses kebijaksanaan publik dalam melakukan kebijakannya ialah implementasi, jika kebijakan sudah dibuat namun tidak diimplementasikan tentu saja tidak ada artinya. Maka kebijakan merupakan

sebuah hal yang hanya berupa teori, yang tidak ada hasilnya, karena tidak diimplementasikan atau tidak dilakukan. Sehingga dalam perumusan sebuah kebijakan yang sudah dibuat harus dilakukannya implementasi sebagai terusan atau praktik dari formulasi kebijakan yang sudah dibuat dalam mencapai sebuah tujuan yang mampu menghasilkan dampak baik bagi masyarakat atau publik.

2.2.6. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah maupun *stakeholder* terhadap permasalahan publik atau masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mengatasi persoalan dalam publik yang sifatnya menguntungkan publik atas kebijakan yang dilaksanakannya. Sehingga persoalan yang ada pada masyarakat pun dapat teratasi dengan adanya kebijakan yang dibuat.

Menurut Ndraha dalam buku Kamal Alamsyah (2016:24) yang memaparkan pendapatnya, bahwa : “Kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat”. Berkenaan dengan pendapat tersebut terhadap kebijakan yang memiliki arti sebagai pilihan yang terbaik untuk dijadikan solusi dalam suatu permasalahan yang sedang dialami oleh publik. Dan dilakukan dalam batas-batas kompetensi tiap aparatur (aktor) dan pemerintah (lembaga) terkait urgensinya yang berarti secara formal kebijakan itu mengikat.

Berdasarkan teori dari Carl J. Federick sebagaimana yang dikutip oleh Leo Agustino dalam buku DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. (2014:2) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Serangkaian tindakan yang dibuat atas usulan masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang dialami di tiap desa-desa merupakan hal yang perlu diatasi oleh kebijakan. Dengan itu, Dinas LH selaku penyelenggara kebijakan program kampung saber melakukan pelaksanaan kebijakan atas usulan kebijaksanaan stakeholder yang mendengar dan memperhatikan permasalahan yang terjadi. Sehingga tercapainya tujuan dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut dengan melakukan kebijakan program yang diimplementasikan kepada desa-desa di Kabupaten Bandung.

Adapun teori Menurut Aminullah yang di kutip Muhammadi (2001) dalam buku Kamal Alamsyah (2016:28) yang mengatakan bahwa : “Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh”. Upaya dari tindakan pemerintah dalam mempengaruhi pencapaian tujuannya adalah bersifat strategis, yang mana kebijakan yang dibuat merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan pada publik secara menyeluruh dan berjangka panjang, yang berarti kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan dan persoalan publik yang orientasinya dapat menguntungkan publik.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut (Lubis, 2007:5) dalam buku Kamal Alamsyah (2016:29) yang mendefinisikan : “Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan”. Kebijakan yang sedang atau sudah dibuat tentu didalamnya perlu adanya sebuah keputusan dari pemangku kepentingan sebagai pembuat kebijakan dalam rangka untuk mencari jalan terbaik terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang muncul sebagai tujuan bersama. Keputusan yang tetap dan mutlak dalam kebijakan adalah sebagai tahap akhir pada saat selesainya kebijakan yang dibuat. Karena kebijakan merupakan tindakan yang dirangkai dan perlu dilakukannya pengambilan keputusan untuk

menetapkan langkah seperti apa yang akan dilakukan dalam mengaplikasikan kebijakan terhadap permasalahan yang ada.

Seperti yang dipaparkan Menurut Eualau dan Prewitt (dalam Leo Agustino 2016:17) yang menyatakan bahwa : “Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Tingkah laku para pemangku kebijakan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang akan dilakukan, jadi kebijakan yang dibuat dan ditetapkan harus sesuai dan mampu mengatasi persoalan yang muncul. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besar permasalahan maka harus semakin matangnya kebijakan yang diputuskan dan ditetapkan.

Dan Kebijakan Menurut Friedrich dalam Leo Agustino (2016:16) yang memaparkan : “Kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud”. bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich ini adalah maksud dan tujuan dari pemerintah dalam membuat kebijakan harus jelas dan sesuai dengan permasalahan yang muncul serta atas keinginan masyarakat yang mengalami langsung permasalahan di lingkungannya. Dan walaupun tidak selalu mudah dalam melakukan dan membuat kebijakan, setidaknya kebijakan yang dibuat atas dasar keinginan dan ide dari masyarakat, yang mampu mengatasi dan menguntungkan masyarakat dari ide atau kebijakan yang dibuat *stakeholder*.

2.2.7. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang atau masyarakat di suatu negara terhadap permasalahan yang ada di dalam publik untuk kemudian

diatasi oleh serangkaian tindakan atau kebijakan yang sudah dibuat.

Menurut Kraft & Furlong dalam Riat Nugroho (2015:105) yang memaparkan bahwa :

“Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruang khusus”, kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Karena Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, serta nilai politik yang berlaku terhadap suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variable yang lain.”

Sedangkan menurut Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2008:6) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Disisi lain kebijakan publik bisa saja menjadi alat untuk menguntungkan sebelah pihak demi memperkaya individual atau kelompok tertentu.

Hal ini mengartikan terkadang proses dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat selalu saja berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. Nugroho (2015:902) dalam bukunya berpendapat bahwa :

“Persoalan kebijakan publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip karakteristik yang melekat di masing-masing negara. Setiap negara mempunyai karakter yang berbeda satu sama lainnya. Negara-negara berkembang tentunya mempunyai karakter yang berbeda dengan negara-negara maju dalam segala aspeknya. Namun demikian, di Negara-negara berkembang, kebijakan publik dikembangkan seperti di negara-negara maju.”

Di setiap negara tentu saja pelaksanaan kebijakan publik berbeda-beda, karena setiap negara memiliki prinsip dan karakteristik tersendiri yang menjadi cerminan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di negaranya. Apalagi jika dibandingkan pelaksanaan kebijakan publik pada negara maju dan negara berkembang, ini tentu saja menjadi sebuah tolak ukur negara dalam menghadapi permasalahan di tiap negaranya. Namun seiring berjalannya waktu, negara berkembang mampu mengimplementasikan kebijakan publik dengan mengikuti apa yang dilakukan negara maju saat melaksanakan kebijakan publik yang menjadi solusi dalam

mengatasi permasalahan yang terjadi di negaranya, dengan demikian saat sudah mengetahui seperti apa pelaksanaan kebijakan publik pada negara maju kini tergantung masing-masing negara berkembang bagaimana cara mengaplikasikan kebijakan di tiap negaranya sesuai dengan prinsip dan karakteristiknya.

Selanjutnya teori Menurut Thomas Dye dalam Ravik Karsidi (2018:7) yang mendefinisikan bahwa :

“Kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).”

Teori tersebut mengartikan bahwa perwujudan berupa tindakan pemerintah dalam mengatasi persoalan publik adalah kebijakan, yang mana kebijakan dibuat atas permasalahan yang terjadi dan bukan keinginan pemerintah atau pejabat publik dalam membuat kebijakan publik. Dan terkadang bahkan pemerintah tidak melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang terjadi, dan itu juga merupakan kebijakan publik yang mana dengan tidak melakukan sesuatu itu dapat memberikan pengaruh atau dampak yang sama terhadap pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kemudian Teori Kebijakan Publik Menurut Mac Rae & Wilde dalam buku Kamal Alamsyah (2016:26) yang menyatakan bahwa :

”kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap sejumlah besar orang.”

Sedangkan Menurut Thomas Dye dalam buku yang sama Kamal Alamsyah (2016:27) bahwa :

“kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik, agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”

Melihat uraian di atas bahwa kebijakan publik menjadi kepentingan publik utama. Kebijakan publik dan para pengambil kebijakan (birokrat) setidaknya harus memiliki landasan terhadap kepentingan publik. Artinya, kebijakan publik harus mempunyai ruh yang kuat dengan semangat kepublikan atau *the spirit of publicness*, agar kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terakomodir secara baik. Pada sisi lain, kebijakan publik juga harus memunculkan semangat responsibilitas administratif. Secara politis para administrator publik juga profesional dalam menjalankan tugasnya secara baik sebagai langkah implementasi responsibilitas objektif dan subjektif yang diimbangi oleh peningkatan aktualisasi diri sebagai pelayan publik.

Kemudian Menurut Easton dalam Subarsono (2016:3) menyebutkan bahwa : “Yang memperlakukan kebijakan publik sebagai instrumen politik untuk mengalokasi nilai-nilai”. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai instrumen politik untuk mengalokasi nilai-nilai yang mana jika dilihat pada teori diatas memiliki dua sisi, di satu sisi kebijakan memiliki unsur dimensi yang bersifat instrumental dalam menghasilkan keputusan yang diambil, dari program dan hasil lainnya terhadap nilai-nilai yang di yakini oleh pemangku kebijakan dalam membuat dan melaksanakannya pasti adanya sebuah perangkat hubungan terhadap kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norma-norma etika dan moral, dari proses membangun jalinan kepercayaan (*trust*) dan solidaritas antar pemangku. Dan di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti-nilai seperti dominasi dan proses *non-developmental*. Nilai-nilai yang menjadi basis kebijakan publik dapat bersifat antagonistik tergantung kepada

permasalahan yang ada di masyarakat, jika mungkin sesuai dan sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat, cenderung kemungkinan pemangku kebijakan bisa dikatakan mampu dalam memadukan kebijakan sebagai alat instrumental politik dengan tindakan dasar yang mampu mengatasi persoalan masyarakat.

2.2.8. Pengambilan Keputusan

Jika Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan pemerintah, maka pasti di dalamnya ada pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan merupakan penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Dalam rangkaian kebijakan tentu dipenuhi oleh serangkaian pembuatan atau pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam tahap proses kebijakan hingga ke pelaksanaannya demi terkendali dan tercapainya target dan tujuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, pengambilan keputusan-keputusan terhadap kebijakan program kampung saber melibatkan bidang-bidang yang terkait didalamnya, salah satunya ialah bidang KPKL yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan kebijakan yang dibuat akan dibawa kemana, yang tentunya dalam tahap pengambilannya pun sesuai dengan persetujuan *stakeholder* sebagai penentu dan yang memberikan legitimasi atas kebijakan yang sudah dibuat hingga ke pelaksanaannya.

Moergan dan Celrullo dalam Fatresi (2017:51) yang mendefinisikan Pengambilan Keputusan sebagai : “Kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan”. Kesimpulan yang dicapai pada saat sudah dilakukannya pertimbangan lalu kemudian dipilih dan ditetapkan untuk dilaksanakan, dan beberapa keputusan lainnya yang tidak dipilih bisa dijadikan opsi alternatif atau bahkan dikesampingkan dulu untuk sementara sambil menunggu hasil dari keputusan yang sudah dipilih seperti apa.

Sedangkan pendapat Pengambilan Keputusan Menurut Syamsi dalam Fatresi (2017:51) yang memaparkan : “Pengambilan keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi”. Keputusan yang dibuat merupakan hasil dari proses pemikiran para pihak yang terlibat dalam mengambil salah satu jalan yang akan dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan dari kebijakan yang sudah dibuat, yang nantinya beberapa alternatif lainnya merupakan keputusan yang dapat digunakan jika mungkin diperlukan sambil melihat dan menunggu hasil keputusan pertama dilakukan seperti apa.

Adapun kutipan teori pengambilan keputusan Menurut Baron dan Byner dalam Zulkilfi (2018:182) yang menjelaskan bahwa :

“Pengambilan keputusan merupakan suatu proses melalui kombinasi individu dan kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan bertujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan-kemungkinan tindakan, pengambilan keputusan sebagai suatu proses untuk mengevaluasi tiap pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan”.

Jika dilihat dari kutipan teori diatas pada sebuah proses pengambilan keputusan perlu melalui tahap kombinasi dengan melibatkan pihak terkait baik individu maupun kelompok, serta mengintegrasikan informasi yang ada namun terkait seputar permasalahan yang ada, yang tujuannya untuk memilih dari satu ke beberapa kemungkinan yang memungkinkan satu tindakan tersebut harus dilakukan. Sehingga suatu pengambilan keputusan merupakan sebagai salah satu proses dalam mengevaluasi beberapa pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yang mana ini sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kebijakan terhadap permasalahan yang muncul yang segera harus diselesaikan secara bersama.

Pengambilan Keputusan menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya (2017:18-19) bahwa : “Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif”. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu

terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dengan mengikat seluruh masyarakat. Selain itu juga, pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan yang akan dipilih sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Selanjutnya pengertian pengambilan keputusan menurut Furqon Mauladani dalam bukunya yang berjudul *Teori Pengambilan Keputusan* (2019:8) yang menyebutkan bahwa : “Pengambilan keputusan adalah pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak”. Menurutnya dalam pengambilan keputusan didalamnya memiliki kondisi dibawah kepastian, dibawah resiko, dan dibawah ketidakpastian. Karena dalam hal tersebut pengambilan keputusan terjadi dalam kondisi dibawah kepastian mengetahui dengan pasti *pay off* dari setiap alternatif keputusan yang dipilih dengan kemungkinan kesalahan terhadap pengambilan keputusannya relatif kecil.

Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan (probabilitas) dalam suatu kejadian alam dari tiap alternatif yang dipilihnya, kemungkinannya didapat dari dasar informasi yang tersedia ataupun pengalaman dalam mengambil keputusan. Dan terkadang dalam pengambilan keputusan pun tidak luput dari ketidakpastian yang terjadi, hal ini terjadi karena pengambilan keputusan terkadang tidak mengetahui probabilitas kepada kejadian alam yang ada pada tiap alternatif, dalam hal tersebut dapat terjadi dari penerimaan data atau minimnya informasi yang diterima. Sehingga dapat dikatakan jika pengambilan keputusan perlu ekstra hati-hati dalam melakukannya, dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang terjadi jika melakukan alternatif dampak apakah yang akan terjadi, begitupun sebaliknya.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjadi sebuah alur dalam tahap penyusunan skripsi yang dilakukan peneliti dalam membuat konsep yang didalamnya memiliki keterkaitan antara variabel satu

dengan variabel lainnya dengan teori sebagai landasan dalam berpikir yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami beberapa variabel data yang dihimpun oleh peneliti ke dalam skripsi ini. Seperti yang dipaparkan Menurut Sugiyono (2017:60) yang mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan Dinas LH terhadap Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) sebagai upaya dalam mengatasi masalah yang muncul yang direalisasikan atas visi Dinas LH, yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta sinergi Pembangunan Perdesaan berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dan beberapa *point* pada misi Dinas LH yang ke empat, ke enam, dan ke tujuh, yaitu : 4. Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat, 6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, 7. Meningkatkan Kemandirian Desa. Visi dan misi tersebut sebagai dasar atau kerangka dalam penyelenggaraan kebijakan program kampung saber ini terhadap tiap desa yang ada di Kabupaten Bandung.

Dalam proses penyelenggaraan kebijakan program kampung saber yang dibuat oleh Dinas LH, tentu saja prosesnya pun mencakupi beberapa tahap yang menjadi landasan kerangka dalam mencapai keberhasilan kebijakannya, yang mana konsep atau kerangkanya berdasarkan teori terkemuka. dan peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai acuan terhadap kebijakan Dinas LH tersebut yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (Dalam Leo Agustino 2016) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*)

Yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

- Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Mencakup :

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi) *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut khususnya dalam implementasi kebijakan program kampung saber di Kabupaten Bandung.

- b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada *point* ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di Desa Indragiri lebih suka menerima program kampung saber daripada menerima program kredit sepeda motor.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)

Setiap kebijakan pasti memiliki target yang hendak ingin dicapainya. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada *point* ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok atau masyarakat sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan sembako kepada kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu program kampung saber ini perlu dilakukan secara *sustainable*. Sehingga akan meningkatkan pengendalian dan penanganan terhadap suatu program akan lebih baik.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan menjadi peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan yang baik dari suatu kebijakan yang sudah dibuat dan akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika Dinas LH memiliki program kampung saber dengan memberikan edukasi dan juga berupa bantuan dana terhadap tiap desa, banyak orang menanyakan apakah letak program kampung saber yang dilakukan Dinas LH ini sudah tepat.

e. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program tentu harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi berhasilnya suatu kebijakan yang dibuat. Dan ini sudah harus terpapar juga terdata dengan baik apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci.

f. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Sumber daya yang digunakan berperan penting terhadap jalannya program kebijakan yang dibuat. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumber daya tersebut bisa meliputi anggaran dana, alat yang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak yang mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber yang digunakan dalam menunjang suatu program kebijakan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait.

- Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup :

a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan tentu perlu dipertimbangkan juga kekuatan dan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat guna untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang akan diharapkannya.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

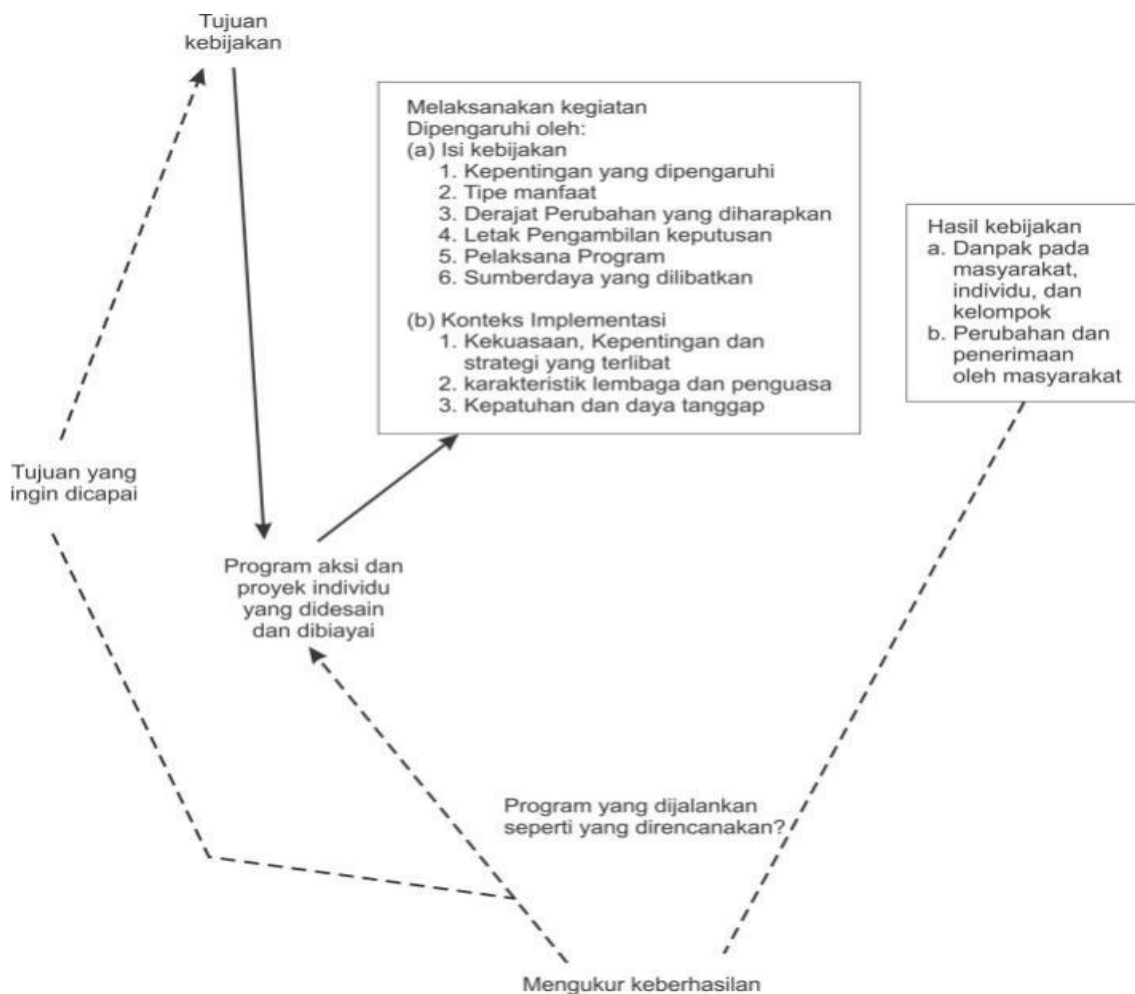
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan dan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan yang sudah dibuat. Sehingga nantinya penyesuaian organisator dan organisasi mampu bersinergi dengan apa yang sedang dilaksanakan dalam merealisasikan suatu program yang sudah atau sedang dirumuskan/diformulasikan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Selain itu yang dirasa juga penting terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan ialah kepatuhan dan respon dari para implementor kebijakan, maka yang hendak dijelaskan dalam *point* ini ialah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan yang akan diimplementasikan di suatu wilayah.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang signifikan. Jika kebijakan yang sudah dibuat dan akan diimplementasikan, disinilah peran Implementasi merupakan sebagai proses politik dan Administrasi terhadap suatu program atau kebijakan yang ada, kebijakan yang sedang atau telah diformulasikan hingga pada tahap implementasinya dengan mengkomunikasikan secara langsung terhadap para *stakeholder* atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan maupun perumusan kebijakan program yang akan direalisasikan, hingga nantinya pada tahap evaluasi secara menyeluruh dan mendetail dari apa yang sudah diimplementasikan program kebijakannya tersebut, sehingga untuk kedepannya agar mampu dijalankan secara maksimal dan lebih baik lagi tentunya.

Alur pada kerangka berfikir yang dimuat oleh peneliti merupakan dasar dari landasan teori yang peneliti lakukan dan kemudian diterapkan ke dalam penelitian ini, sehingga kerangka berfikir berdasarkan landasan teori dari Sugiyono (2017:60) ini merupakan sebuah pedoman atau acuan dalam membuat kerangka berfikir pada penelitian Implementasi Kebijakan Program Kampung Saber ini, berikut gambar tahapan kerangka berfikir dengan variabel Implementasi Kebijakan :



Gambar 1
Kerangka Berfikir

Sumber : Merilee S. Grindle (Dalam Leo Agustino 2016)

2.4. Proposisi

Berkenaan dengan kerangka berfikir diatas, penulis membuat proposisi terhadap Implementasian kebijakan program kampung saber yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berdasarkan pada indikator program kampung saber, khususnya indikator sarana dan prasarana dalam mengelola lingkungan hidup pada aspek implementasi kebijakan program kampung sabilulungan bersih sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibuat, indikator program sabilulungan bersih tersebut memuat beberapa sumber daya yang berkaitan dengan berjalannya program tersebut, diantaranya ialah adanya bantuan APBD, sosialisasi dan edukasi, membuat LCO (Lubang Cerdas Organik), SATAPOK (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan), membuat bank sampah, mengolah sampah dengan mendaur ulang dan menjadi bahan pakan. Ini merupakan bentuk upaya dalam mewujudkan Bandung bersih yang disatukan ke Program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih).